# BAB V
# OUTPUT PENELITIAN

## A. Judul

Refleksi SNBP “Merajut Kembali Benang Kesempatan”

## B. Ringkasan Eksekutif

Kebijakan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) menggemparkan secara nasional salah satunya di sulawesi selatan Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di kota makassar dengan menyoroti permasalahan fenomena keterlambatan finalisasi pangkalan data sekolah dan siswa (Pdss). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) ditinjau berdasarkan teori George C. Edward III ditemukan Komunikasi antara pihak pelaksana dinas pendidikan provinsi dan sekolah terkait kebijakan SNBP sudah cukup baik namun masih ada kendala pada komunikasi saat sekolah menghadapi kendala mereka belum proaktif melaporkan ke dinas pendidikan provinsi sebagai instansi pengawas. Disposisi yakni terkait komitmen para pelaksana di sekolah masih tergolong rendah sehingga menghambat implementasi kebijakan SNBP, Struktur birokrasi yakni masih adanya hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan dikarenakan struktur organisasi belum terdistribusi dengan jelas disekolah, Masih perlunya pengawasan ekstra yang dilakukan oleh dinas pendidikan ke sekolah sekolah untuk memastikan tujuan dari kebijakan tercapai. kemudian rekomendasi yang diberikan yakni pemberian sanksi, pengawasan ekstra, pertemuan strategis dengan kemendikbud, penerbitan sk dan upgrade sistem pengawasan.

## C. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu dari 17 tujuan dan urgensi sustainable development goals (SDGs) yakni pada point ke empat menyoroti urgensi peningkatan mutu pendidikan secara global. Salah satu tantangan bagi dunia pendidikan di Indonesia ialah bagaimana menyediakan suatu sistem pendidikan yang berkualitas untuk membentuk generasi cerdas Pendidikan di tingkat Menengah memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pendidikan Menengah adalah era dimana sebagian murid mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi yakni pada perguruan tinggi yang mereka cita-citakan. Untuk siswa sekolah menengah yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi mendapat kesempatan yang besar dalam menempuh pendidikan lanjutan melalui regulasi yang diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah untuk merumuskan arah kebijakan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) telah menyusun arah baru dalam pendidikan yakni; Transformasi seleksi masuk perguruan tinggi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lulusan yang multidisiplin dan memiliki dasar yang kuat terhadap disiplin ilmu utama setiap program studinya Berdasarkan Permendikbud Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri terdapat Tiga jalur penerimaan, salah satunya adalah Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan prestasi (SNBP) merupakan seleksi khusus yang diperuntukan kepada siswa yang berprestasi di sekolah atau yang disebut juga dengan siswa Eligible. Dilansir pada laman website Kemendikbudristek Kebijakan Seleksi

Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Berfokus pada pemberian penghargaan yang tinggi atas kesuksesan pembelajaran yang menyeluruh pada pendidikan menengah. Kemendikbudristek Kebijakan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Berfokus pada pemberian penghargaan yang tinggi atas kesuksesan pembelajaran yang menyeluruh pada pendidikan menengah.

Kemudian untuk melaksanakan kebijakan hal ini ditinjau pada surat dikdasmen Nomor: 2630/C5/DM.00.02/2024 Mengacu pada SNPMB 2025 Nomor 746/a.u/snpmb/XII/2024 tentang Permohonan Persiapan Integrasi E-rapor ke PDSS dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Tahun 2025 yakni Dinas Pendidikan Provinsi memantau sekolah dalam proses persiapan dan pendaftaran SNPMB 2025 dan memastikan sekolah telah menyelesaikan semua persyaratan sebelum masa pendaftaran berakhir kemudian satuan pendidikan diharapkan memperhatikan dan mengingat tanggal-tanggal penting dalam pelaksanaan SNPMB Tahun 2025 dan tepat waktu dalam mengikuti proses pendaftaran. Akan tetapi pada kenyataannya fenomena yang terjadi pada penyelenggaraan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi(SNBP) secara nasional yang dilaksanakan secara serentak di indonesia memunculkan berbagai permasalahan Khususnya di sulawesi selatan yakni ada 3 sekolah sma/smk yang lambat finalisasi data PDSS. Kemudian upaya pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan lambatnya sekolah finalisasi data PDSS ialah dengan memberikan perpanjangan waktu sebanyak 4 kali untuk melakukan finalisasi data. Namun hal ini masih menjadi polemik dikarenakan masih adanya sekolah yang lalai finalisasi data pdss. Pada tahun sebelumnya 2023 Bekti Cahyo Hidayanto selaku sekretaris eksekutif Seleksi Nasional Penerimaan

Mahasiswa Baru (SNPMB) mengatakan hingga 3.000 sekolah dengan 70.000 siswa data tahun 2023 tidak akan dapat berpartisipasi dalam SNBP. Kemudian pada tahun 2025 ini, kejadian yang sama terulang kembali. Kemudian Kebijakan terkait pengunduran jadwal finalisasi tidak hanya berisiko menimbulkan ketidakadilan, tetapi juga menciptakan preseden buruk bagi kedisiplinan administratif.perpanjangan waktu terus menerus di berikan kepada sekolah yang terkendala, maka sekolah-sekolah yang telah berusaha menaati jadwal dan megerjakan tepat waktu akan merasa dirugikan.

Oleh karena itu dinas pendidikan provinsi sulawesi selatan merupakan penpanjangan tangan dari pusat untuk melaksanakan dan meneruskan kebijakan seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP) di daerahnya termasuk kota makassar mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi sekolah sekolah terkait pelaksanaan kebijakan snbp sesuai pada Surat Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Panitia SNPMB 2025 Nomor 746/a.u/snpmb/XII/2024 tentang Permohonan Persiapan Integrasi E-rapor ke PDSS dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Tahun 2025, dengan hormat kami sampaikan halhal sebagai: Dinas Pendidikan Provinsi diharapkan memantau sekolah dalam proses persiapan dan pendaftaran SNPMB 2025 dan memastikan sekolah telah menyelesaikan semua persyaratan sebelum masa pendaftaran berakhir.

**D. Deskripsi Masalah**

Peneliti menganalisis ditinjau dari teori George C Edward terkait implementasi kebijakan (Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Struktur Birokrasi) implementasi kebijakan SNBP di kota makassar menghadapi tantangan dan hambatan, meskipun upaya pemerintah sudah cukup baik

akan tetapi hambatan utama berada pada pihak internal sekolah yakni kelalaian pihak sekolah dalam menjalankan kebijakan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang mengakibatkan hilangnya kesempatan siswa eligible untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri dalam hal ini;

1. Komunikasi antara pihak pelaksana dinas pendidikan provinsi dan sekolah terkait kebijakan SNBP sudah cukup baik namun masih ada kendala pada komunikasi saat sekolah menghadapi kendala mereka belum proaktif melaporkan ke dinas penidikan provinsi sebagai instansi pengawas
2. Disposisi yakni terkait komitmen para pelaksana di sekolah masih tergolong rendah sehingga menghambat implementasi kebijakan SNBP
3. Struktur birokrasi yakni masih adanya hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan dikarenakan struktur organisasi belum terdistribusi dengan jelas disekolah.
4. Masih perlunya pengawasan ekstra yang dilakukan oleh dinas pendidikan ke sekolah sekolah untuk memastikan tujuan dari kebijakan tercapai.

**E. Rekomendasi**

1. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap kebijakan SNBP, direkomendasikan agar Dinas Pendidikan Provinsi menyusun dan mengimplementasikan mekanisme sanksi tertulis yang jelas bagi sekolah sekolah yang terbukti laiai dalam pelaksanaan kebijakan snbp. Disertai program diseminasi informasi dan pedoman yang sistematis, langkah ini krusial untuk membentuk budaya disiplin dan memastikan kelancaran pelaksanaan SNBP berkelanjutan." Sanksi ini harus diikuti dengan sosialisasi intensif dan pembinaan agar menjadi

instrumen perbaikan yang mendorong kepatuhan dan kesiapan sekolah di tahun-tahun mendatang,

2. Untuk menjamin kelancaran dan efektivitas implementasi kebijakan seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP), Dinas Pendidikan Provinsi perlu mengintensifkan pengawasan berjenjang terhadap sekolah-sekolah. Pengawasan ini tidak hanya sebatas pemantauan melalui sistem digital, tetapi juga harus mencakup kunjungan langsung ke sekolah yang terindikasi lama finalisasi data pdss sebelum tenggat waktu. Pendekatan ganda ini penting untuk mengidentifikasi serta mengatasi kendala dan hambatan yang dialami sekolah secara riil di lapangan, memastikan setiap satuan pendidikan mendapatkan dukungan yang optimal.
3. Untuk mengatasi masalah keterlambatan input dan finalisasi data, Dinas Pendidikan Provinsi perlu menginisiasi pertemuan strategis dengan Kemendikbudristek. Fokus utama pertemuan ini adalah penyelerasan implementasi dan pemanfaatan ERapor secara menyeluruh oleh seluruh sekolah. Langkah ini berguna untuk memastikan kelancaran proses verifikasi data dan meminimalisir hambatan teknis yang sering terjadi dalam pelaksanaan SNBP di kemudian hari.
4. Untuk menjamin kelancaran dan komitmen internal sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi perlu menginstruksikan setiap sekolah untuk membentuk komite khusus SNBP. Pembentukan komite ini harus diikuti dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) atau struktur kepanitiaan yang jelas, yang secara rinci menetapkan tanggung jawab masing-masing anggota. Dinas Pendidikan Provinsi harus mengkomunikasikan rekomendasi ini secara tegas dan komprehensif kepada seluruh kepala sekolah dan jajaran terkait. Komunikasi dapat dilakukan melalui surat

edaran resmi, forum sosialisasi, atau webinar, memastikan setiap sekolah memahami urgensi dan mekanisme pembentukan komite ini untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan SNBP di masa mendatang. Rekomendasi ini ditinjau dari permasalahan terkait pelaksanaan snbp dimana wewenang di sekolah masih tumpang tindih terkait tanggung jawab melaksanakan kebijakan SNBP.

5. Untuk memastikan akurasi dan ketepatan waktu penginputan data PDSS di tiap sekolah, perlu untuk mengembangkan sistem pemantauan terintegrasi yang mampu melihat progres input data di setiap provinsi kab/kota secara real-time. dengan menampilkan persentase kelengkapan dan status finalisasi data per sekolah dan per provinsi. perlunya update sistem viewer monitoring secara transparan mulai dari proses awal-akhir agar lebih mudah mengantisipasi sekolah yang terindikasi telat finalisasi data.

**F. Infografis Policy Brief**



# RINGKASAN EKSEKUTIF

**Kebijakan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) menggemparkan secara nasional salah satunya di sulawesi selatan Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di kota makassar dengan menyoroti permasalahan fenomena keterlambatan finalisasi pangkalan data sekolah dan siswa (Pdss). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) ditinjau berdasarkan teori George C. Edward III ditemukan Komunikasi antara pihak pelaksana dinas pendidikan provinsi dan sekolah terkait kebijakan SNBP sudah cukup baik namun masih ada kendala pada komunikasi saat sekolah menghadapi kendala mereka belum proaktif melaporkan ke dinas pendidikan provinsi sebagai instansi pengawas. Disposisi yakni terkait komitmen para pelaksana di sekolah masih tergolong rendah sehingga menghambat implementasi kebijakan SNBP, Struktur birokrasi yakni masih adanya hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan dikarenakan struktur organisasi belum terdistribusi dengan jelas disekolah, Masih perlunya pengawasan ekstra yang dilakukan oleh dinas pendidikan ke sekolah sekolah untuk memastikan tujuan dari kebijakan tercapai. kemudian rekomendasi yang diberikan yakni pemberian sanksi, pengawasan ekstra, pertemuan strategis dengan kemendikbud, penerbitan sk dan upgrade sistem pengawasan,**

# PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu dari 17 tujuan dan urgensi sustainable development goals (SDGs) yakni pada point ke empat menyoroti urgensi peningkatan mutu pendidikan secara global. Salah satu tantangan bagi dunia pendidikan di Indonesia ialah bagaimana menyediakan suatu sistem pendidikan yang berkualitas untuk membentuk generasi cerdas

Pendidikan di tingkat Menengah memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Pendidikan Menengah adalah era dimana sebagian murid mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi yakni pada perguruan tinggi yang mereka cita-citakan. Untuk siswa sekolah menengah yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi mendapat kesempatan yang besar dalam menempuh pendidikan lanjutan melalui regulasi yang diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah untuk merumuskan arah kebijakan yang berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) telah menyusun arah baru dalam pendidikan yakni; Transformasi seleksi masuk perguruan tinggi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lulusan yang multidisiplin dan memiliki dasar yang kuat terhadap disiplin ilmu utama setiap program studinya

Berdasarkan Permendikbud Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri terdapat Tiga jalur penerimaan, salah satunya adalah Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan prestasi (SNBP) merupakan seleksi khusus yang diperuntukan kepada siswa yang berprestasi di sekolah atau yang disebut juga dengan siswa Eligible. Dilansir pada laman website Kemendikbudristek Kebijakan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Berfokus pada pemberian penghargaan yang tinggi atas kesuksesan pembelajaran yang menyeluruh pada pendidikan menengah.

Kemendikbudristek Kebijakan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Berfokus pada pemberian penghargaan yang tinggi atas kesuksesan pembelajaran yang menyeluruh pada pendidikan menengah. Kemudian untuk melaksanakan kebijakan hal ini ditinjau pada surat dikdasmen Nomor: 2630/C5/DM.00.02/2024 Mengacu pada SNPMB 2025 Nomor 746/a.u/snpmb/XII/2024 tentang Permohonan Persiapan Integrasi E-rapor ke PDSS dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Tahun 2025 yakni Dinas Pendidikan Provinsi memantau sekolah dalam proses persiapan dan pendaftaran SNPMB 2025 dan memastikan sekolah telah menyelesaikan semua persyaratan sebelum masa pendaftaran berakhir kemudian satuan pendidikan diharapkan memperhatikan dan mengingat tanggal-tanggal penting dalam pelaksanaan SNPMB Tahun 2025 dan tepat waktu dalam mengikuti proses pendaftaran. Akan tetapi pada kenyataannya fenomena yang terjadi pada penyelenggaraan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi(SNBP) secara nasional yang dilaksanakan secara serentak di indonesia memunculkan berbagai permasalahan Khususnya di sulawesi selatan yakni ada 3 sekolah sma/smk yang lambat finalisasi data PDSS.

Kemudian upaya pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan lambatnya sekolah finalisasi data PDSS ialah dengan memberikan perpanjangan waktu sebanyak 4 kali untuk melakukan finalisasi data. Namun hal ini masih menjadi polemik dikarenakan masih adanya sekolah yang lalai finalisasi data pdss. Pada tahun sebelumnya 2023 Bekti Cahyo Hidayanto selaku sekretaris eksekutif Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) mengatakan hingga 3.000 sekolah dengan 70.000 siswa data tahun 2023 tidak akan dapat berpartisipasi dalam SNBP. Kemudian pada tahun 2025 ini, kejadian yang sama terulang kembali. Kemudian Kebijakan terkait pengunduran jadwal finalisasi tidak hanya berisiko menimbulkan ketidakadilan, tetapi juga menciptakan preseden buruk bagi kedisiplinan administratif.perpanjangan waktu terus menerus di berikan kepada sekolah yang terkendala, maka sekolah-sekolah yang telah berusaha menaati jadwal dan megerjakan tepat waktu akan merasa dirugikan.

Oleh karena itu dinas pendidikan provinsi sulawesi selatan merupakan penpanjangan tangan dari pusat untuk melaksanakan dan meneruskan kebijakan seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP) di daerahnya termasuk kota makassar mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi sekolah sekolah terkait pelaksanaan kebijakan snbp sesuai pada Surat Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Panitia SNPMB 2025 Nomor 746/a.u/snpmb/XII/2024 tentang Permohonan Persiapan Integrasi E-rapor ke PDSS dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Tahun 2025, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai: Dinas Pendidikan Provinsi diharapkan memantau sekolah dalam proses persiapan dan pendaftaran SNPMB 2025 dan memastikan sekolah telah menyelesaikan semua persyaratan sebelum masa pendaftaran berakhir.

# DESKRIPSI MASALAH

Peneliti menganalisis ditinjau dari teori George C Edward terkait implementasi kebijakan (Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Struktur Birokrasi) implementasi kebijakan SNBP di kota makassar menghadapi tantangan dan hambatan, meskipun upaya pemerintah sudah cukup baik akan tetapi hambatan utama berada pada pihak internal sekolah yakni kelalaian pihak sekolah dalam menjalankan kebijakan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang mengakibatkan hilangnya kesempatan siswa eligible untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri dalam hal ini;

- Komunikasi antara pihak pelaksana dinas pendidikan provinsi dan sekolah terkait kebijakan SNBP sudah cukup baik namun masih ada kendala pada komunikasi saat sekolah menghadapi kendala mereka belum proaktif melaporkan ke dinas penidikan provinsi sebagai instansi pengawas.
- Disposisi yakni terkait komitmen para pelaksana di sekolah masih tergolong rendah sehingga menghambat implementasi kebijakan SNBP
- Struktur birokrasi yakni masih adanya hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan dikarenakan struktur organisasi belum terdistribusi dengan jelas disekolah
- Masih perlunya pengawasan ekstra yang dilakukan oleh dinas pendidikan ke sekolah sekolah untuk memastikan tujuan dari kebijakan tercapai.

# REKOMENDASI



Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap kebijakan SNBP, direkomendasikan agar Dinas Pendidikan Provinsi menyusun dan mengimplementasikan mekanisme sanksi tertulis yang jelas bagi sekolah sekolah yang terbukti laiai dalam pelaksanaan kebijakan snbp. Disertai program diseminasi informasi dan pedoman yang sistematis, langkah ini krusial untuk membentuk budaya disiplin dan memastikan kelancaran pelaksanaan SNBP berkelanjutan." Sanksi ini harus diikuti dengan sosialisasi intensif dan pembinaan agar menjadi instrumen perbaikan yang mendorong kepatuhan dan kesiapan sekolah di tahun-tahun mendatang

Untuk menjamin kelancaran dan efektivitas implementasi kebijakan seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP), Dinas Pendidikan Provinsi perlu mengintensifkan pengawasan berjenjang terhadap sekolah-sekolah. Pengawasan ini tidak hanya sebatas pemantauan melalui sistem digital, tetapi juga harus mencakup kunjungan langsung ke sekolah yang terindikasi lama finalisasi data pdss sebelum tenggat waktu. Pendekatan ganda ini penting untuk mengidentifikasi serta mengatasi kendala dan hambatan yang dialami sekolah secara riil di lapangan, memastikan setiap satuan pendidikan mendapatkan dukungan yang optimal.

Untuk mengatasi masalah keterlambatan input dan finalisasi data, Dinas Pendidikan Provinsi perlu menginisiasi pertemuan strategis dengan Kemendikbudristek. Fokus utama pertemuan ini adalah penyelerasan implementasi dan pemanfaatan E-Rapor secara menyeluruh oleh seluruh sekolah. Langkah ini berguna untuk memastikan kelancaran proses verifikasi data dan meminimalisir hambatan teknis yang sering terjadi dalam pelaksanaan SNBP di kemudian hari.

POLITEKNIK STIA LAN MAKASSAR

# REKOMENDASI

Untuk menjamin kelancaran dan komitmen internal sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi perlu menginstruksikan setiap sekolah untuk membentuk komite khusus SNBP. Pembentukan komite ini harus diikuti dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) atau struktur kepanitiaan yang jelas, yang secara rinci menetapkan tanggung jawab masing-masing anggota.
Dinas Pendidikan Provinsi harus mengkomunikasikan rekomendasi ini secara tegas dan komprehensif kepada seluruh kepala sekolah dan jajaran terkait. Komunikasi dapat dilakukan melalui surat edaran resmi, forum sosialisasi, atau webinar, memastikan setiap sekolah memahami urgensi dan mekanisme pembentukan komite ini untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan SNBP di masa mendatang. Rekomendasi ini ditinjau dari permasalahan terkait pelaksanaan snbp dimana wewenang di sekolah masih tumpang tindih terkait tanggung jawab melaksanakan kebijakan SNBP



Untuk memastikan akurasi dan ketepatan waktu penginputan data PDSS di tiap sekolah, perlu untuk mengembangkan sistem pemantauan terintegrasi yang mampu melihat progres input data di setiap provinsi kab/kota secara real-time. dengan menampilkan persentase kelengkapan dan status finalisasi data per sekolah dan per provinsi. perlunya update sistem viewer monitoring secara transparan mulai dari proses awal-akhir agar lebih mudah mengantisipasi sekolah yang terindikasi telat finalisasi data

POLITEKNIK STIA LAN MAKASSAR

# DAFTAR PUSTAKA




Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Republik Indonesia Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset. Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri

Republik Indonesia Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset. Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Dan Program Sarjana.

Surat Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Panitia SNPMB 2025 Nomor 746/a u/snpmb/XII/2024 tentang Permohonan Persiapan Integrasi E-rapor ke PDSS dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Seleks Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Tahun 2025

Gea josua, benediktus, Zahra Nur Aqilah, Despri Mariyani Siahaan, Herlinda Herlinda, Olivia Hana Putri Nababan, Frita Rohani Manik, & Jamaludin Jamaludin. (2025). Keterlambatan Pengisian PDSS: Menghambat Impian dan Kesempatan Siswa ke Jenjang Pendidikan Tinggi, Mencari Solusi untuk Meningkatkan Efisiensi Guru dalam Era Pendidikan Abad 21. Edukasi Elita: Jurnal Inovasi Pendidikan, 2(2), 201–207.




SNBP Berikutnya:
Menjadi Katalisator Perubahan Positif di Dunia Pendidikan.



POLITEKNIK STIA LAN MAKASSAR